

JANUARI

2025



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dapat disusun.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan kedua dalam masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi Kabupaten Lombok Timur Priode 2024 – 2026 dan merupakan implementasi atau penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026. Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas.

Dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini tentunya memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeholder lainnya untuk penyempurnaan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau ditargetkan.

Selong, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP.,M.M.A.

Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur	7
2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur	26
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
BAB IV P E N U T U P	31

Lampiran-lampiran :

- Lampiran 2.2.1 : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- Lampiran 2.2.2 : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur Periode Pelaksanaan 2023 dan 2024.
- Lampiran 2.3.1 : Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur.
- Lampiran 3.2.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur.
- Lampiran 3.2.2 : Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026 Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur.

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah otonomi harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) Penyusunan rencana;
- (2) Penetapan rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

RKPD sebagai rencana kerja tahunan di daerah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian kembali terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dengan mengelompokkan program kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak hilang.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang disusun pada tahun kedua RPD Kabupaten Lombok Timur priode 2024-2026 dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 ini

disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 No.114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur No.4);
18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Priode 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang ada.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025, yaitu:

- a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci;
- b. Memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- c. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
- d. Dapat menjadi suatu *performance agreement*;
- e. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
- f. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja;
- g. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026. Berdasarkan Renstra tersebut, pada tahun 2024 terdapat 6 program dengan 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa kegiatan dan komponen kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 22 Sub kegiatan yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, terdiri dari:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini meliputi 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Program ini meliputi kegiatan :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- C. Program Promosi Penanaman Modal.
- Program ini meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- D. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- Program ini meliputi kegiatan :
1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - b) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan.
- E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Program ini meliputi kegiatan :
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- F. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dari kegiatan dan sub kegiatan pada program tahun anggaran 2024, seluruhnya dapat dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu yang mengacu pada Renstra dan realisasi RPD dengan total Pagu Anggaran **Rp 5,567.573.694**, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pagu Anggaran Rp 3.674.428.864)

Dari sisi realisasi anggaran, tingkat capaian program rata-rata 95.71 % atau sebesar Rp 3.381.181.957,00 dari Rp 3.674.428.864,00 yang dianggarkan dan Capaian Kinerja mencapai 82.57 % dari 100% kinerja yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut :

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.**
Anggaran belum terealisasi dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.966.200,00. Berdasarkan output sub kegiatan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 99.62 % atau sebesar Rp 6.966.200,00 namun dari 4 dokumen perencanaan yang ditargetkan dapat diselesaikan seluruhnya.
- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 78.48 % atau sebesar Rp. 2.188.000 dari anggaran Rp. 2.788.000.

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 97.67 % atau sebesar Rp. 3.081.928.326,00 dari Rp. 3.155.453.714 yang dianggarkan dengan capaian kinerja mencapai 90 % atau sebanyak 337 orang yang terbayar dari 420 orang yang dianggarkan.

- **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 88.31 % atau sebesar Rp. 149.930.000,00 dari Rp. 169.770.000,00 yang dianggarkan. Dari sisi output kegiatan mencapai 92 % dimana dari 12 output yang ditargetkan terdapat Sisa yang menjadi hutang jatuh tempo pada TA 2025.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.**

Anggaran untuk sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 6.090.000 atau 84,54 % dari anggaran Rp 7.204.000. Sedangkan realisasi fisik atau output kegiatan ini mencapai 100% karena dari jumlah 2 laporan yang ditargetkan telah terealisasi,

- **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD mencapai 100 % atau sebesar Rp. 5.400.000,00 dari 5.400.000,00 Kemudian untuk realisasi fisik atau capaian output sub kegiatan ini mencapai 100% karena dari 2 laporan yang ditargetkan telah dapat terealisasi.

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Pagu anggaran untuk kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu Rp. 2.118.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.832.300 atau 86.48 %.

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Capaian realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini mencapai 78.68 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.094.400,00 dari Rp. 30.623.360,00 yang dianggarkan. namun untuk realisasi sisa anggaran menjadi hutang jatuh tempo pada TA 2025

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan tahun 2024 adalah sebanyak 2 paket dengan anggaran sebesar Rp. 3.761.100,00 dan terealisasi se100%.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang direncanakan tahun 2024 adalah sebanyak 2 paket dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.000,00 dan yang dapat direalisasikan 31,25 % atau sebesar Rp. 2.250.000.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Dalam Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai 99.44 % atau Rp. 27.307.408,00 dari Rp. 27.461.000,00 yang dianggarkan. Dari 12 Output laporan yang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 10 laporan.

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Capaian realisasi anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100 % atau sebesar Rp.3.000.000,00 dari yang dianggarkan.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Capaian realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 81.39 % atau sebesar Rp. 89.990.740,00 dari Rp. 110.562.900,00 yang dianggarkan. Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 92 % atau sebanyak 12 laporan dari 13 laporan yang ditargetkan dan sisa anggaran dibayarkan pada anggaran TA. 2025.

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Capaian realisasi anggaran sub kegiatan mencapai 84.30 % atau sebesar Rp. 112.069.108,00 dari Rp. 132.943.490,00 yang dianggarkan. Belanja pada sub kegiatan ini meliputi pemeliharaan kendaraan dan pajak kendaraan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Anggaran yang disediakan pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.150.000,00 namun tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki satu kegiatan dengan satu sub kegiatan meliputi ;

- **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar 47.60 % atau Rp. 10.675.000,00 dari Rp. 22.425.000,00 yang dianggarkan. Terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan dan juga menjadi hutang jatuh tempo pada TA. 2025.

- **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

Realisasi Anggaran pada kegiatan ini mencapai 100% atau Rp. 4.625.000 dari Rp. 4.625.000 yang dianggarkan.

c. Program Promosi Penanaman Modal memiliki satu sub kegiatan yang meliputi ;

- **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota**

Realisasi anggaran pada kegiatan ini mencapai Rp. 16.585.000,00 dari Rp. 33.750.000,00 yang dianggarkan atau 49.14 %. Sisa anggaran yang belum direalisasikan menjadi hutang jatuh tempo pada TA. 2025.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki satu kegiatan dengan dua sub kegiatan (Pagu Rp 1.370.133.830,00) yang meliputi ;

- **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai 66.04 % atau sebesar Rp. 817.409.911,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.237.810.830,00. Dari sisi output untuk kegiatan ini tergetnya 4.000 pelaku usaha yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi mencapai 359 % dimana kinerja telah melampaui target dengan realisasi sebanyak 14.363 Pelaku Usaha. Sisa anggaran menjadi hutang jatuh tempo pada TA 2025.

- **Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 132.323.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.023.000,00 atau 95.24 %. Dari sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 8 kasus pengaduan sedangkan yang diselesaikan 12 pengaduan dengan capaian realisasi kinerja 150 %.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi;

- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Realisasi anggaran dari program ini mencapai Rp. 395.174.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 400.674.000,00 atau 98.63 %. Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini mencapai 155 % dimana dari target 155 kegiatan usaha yang terealisasi mencapai 241 kegiatan usaha. Terdapat sisa anggaran yang menjadi hutang jatuh tempo pada TA. 2025

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, meliputi;

- **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Alokasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 66.162.000,00

dengan realisasi Rp. 60.062.000,00 atau 90.78 %. Terdapat sisa anggaran yang belum direalisasikan dan menjadi hutang jatuh tempo pada TA. 2025.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang mengacu pada Renstra dan realisasi RPD dapat dilihat pada table 2.2.1 dan table 2.2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas PMPTSP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban Dinas PMPTSP tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dan memerlukan pemecahan untuk dapat membantu

tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja dan penetapan program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP.

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi adalah seperti dalam table 2.3.1.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

Sedangkan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur adalah meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di kabupaten Lombok Timur dan meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan Pengendalian pelaksanaan nilai investasi melalui peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa setiap nomenklatur program dirinci sampai dengan sub kegiatan. Karenanya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat dicapai melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun seluruhnya merupakan Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Seperti yang telah dikemukakan pada bab I di atas bahwa program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2025-2026 dan mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur maka program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, dengan 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Penanaman Modal dengan uraian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini meliputi kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

C. Program Promosi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - b. Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini meliputi kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 beserta pendanaannya dapat dilihat pada table 3.2.1.

Bab IV

P e n u t u p

Renja OPD menjadi sangat penting artinya dalam merencanakan setiap program dan kegiatan di tingkat OPD. Karena melalui Renja ini dapat dilihat dan diukur sejauh mana setiap program kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

Renja Tahun 2025 ini selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Renja sebagai dokumen *action plan* memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

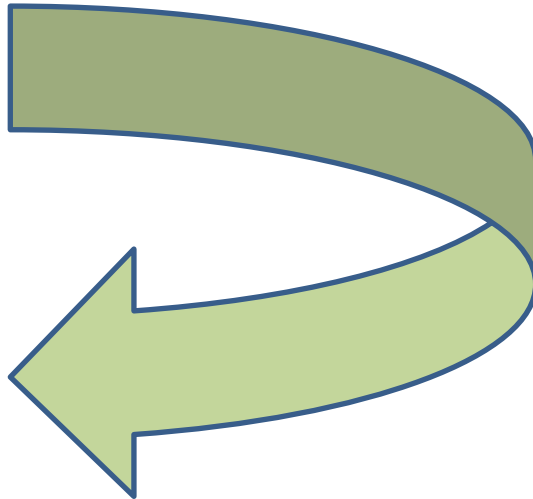
Beberapa kaedah yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

3. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Tabel 2.3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

No.	Bidang	Masalah	Isu Strategis
1.	BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terbatasnya pengetahuan tentang perizinan terkait regulasi terbaru	Perlu diadakan pelatihan berkala
		Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Perlu dukungan sarana prasarana pendukung lainnya
		Pengintegrasian Layanan perizinan melalui MPP	Penyelenggaraan MPP Digital
		Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan perizinan online	Perlu diadakan giat sosialisasi perizinan melalui OSS
2.	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN	Pemahaman tentang perizinan dan penanaman modal belum seragam antar OPD terkait	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait
3.	BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Belum ada kajian tentang penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal	Perlu diadakan kajian untuk menyusun kebijakan penanaman modal di daerah sesuai peraturan perundang - undangan
4.	BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terbatasnya sarana dan prasarana promosi	Menyediakan sarana dan prasarana promosi
5.	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kurangnya kesadaran perusahaan pemegang izin dalam melaksanakan kewajibanya	Meningkatkan pemantuan,pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha
		Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara pelaporan pelaksanaan penanaman modal	Meningkatkan bimbingan teknis pelaksanaan penanaman modal kepada aparaturnya dan perusahaan
6.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN ISISTEM NFORMASI PENANAMAN MODAL	Data realisasi investasi PMA/PMDN belum lengkap	Perlunya sarana teknologi informasi dalam rangka pemutahiran data realisasi investasi PMA/PMDN

Tabel 3.2.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur

PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	SATUAN	Kelompok Sasaran	Indikator Hasil Kegiatan	Formula	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
							2024		2025		2026		Target	Kebutuhan Rp
							Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp	Target	Kebutuhan Rp		
	(3)					(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
							100	3.842.856.381	100	3.925.862.079	100	4.010.660.700	100	11.779.379.160
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program.	%				95	100	3.842.856.381	100	3.925.862.079	100	4.010.660.700	100	11.779.379.160
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	DPMPTSP	Jumlah dokumen		100	100	2.350.702	100	2.401.477	100	2.453.349	100	7.205.528
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				4	4	1.797.002	4	1.835.817	4	1.875.471	4	5.508.290
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				5	5	553.700	5	565.660	5	577.878	5	1.697.238
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	DPMPTSP	Jumlah Dokumen		100	100	3.558.581.368	100	3.635.446.726	100	3.713.972.375	100	10.908.000.468
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				30	30	3.439.611.962	30	3.513.907.580	30	3.589.807.984	30	10.543.327.526
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen				12	12	112.662.048	12	115.095.548	12	117.581.612	12	345.339.208
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan				2	2	6.307.358	2	6.443.597	2	6.582.779	2	19.333.734
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	%	DPMPTSP	Jumlah laporan		100	100	5.629.016	100	5.750.603	100	5.874.816	100	17.254.435
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				3	3	5.629.016	3	5.750.603	3	5.874.816	3	17.254.435
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	DPMPTSP	Jumlah Dokumen		100	100	21.520.748	100	21.985.596	100	22.460.485	100	65.966.829
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket				1	1	1.871.878	1	1.912.311	1	1.953.616	1	5.737.805
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket				1	1	10.012.191	1	10.228.454	1	10.449.389	1	30.690.034
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				2	2	1.033.144	2	1.055.460	2	1.078.258	2	3.166.862
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen				2	2	1.200.000	2	1.225.920	2	1.252.400	2	3.678.320
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan				12	12	7.403.535	12	7.563.451	12	7.726.822	12	22.693.808
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan aset yang direncanakan	%	DPMPTSP	Jumlah Dokumen		100	100	10.000.000	100	10.216.000	100	10.436.666	100	30.652.666
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				2	2	7.000.000	2	7.151.200	2	7.305.666	6	21.456.866
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				2	1	3.000.000	1	3.064.800	1	3.131.000	3	9.195.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	DPMPTSP	Jumlah Laporan		100	100	162.809.945	100	166.326.640	100	169.919.295	100	499.055.880
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				1	1	150.000	1	153.240	1	156.550	1	459.790
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan				36	36	64.974.740	36	66.378.194	36	67.811.963	36	199.164.898
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				13	13	97.685.205	13	99.795.205	13	101.950.782	13	299.431.192

Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	%	DPMTSP	Jumlah Dokumen		100	100	81.964.602	100	83.735.037	100	85.543.714	100	251.243.354	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit				24	24	66.964.602	24	68.411.037	24	69.888.716	24	205.264.355	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				1	1	1.000.000	1	1.021.600	1	1.043.667	1	3.065.267	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit				4	4	5.000.000	4	5.108.000	4	5.218.333	4	15.326.333	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit				1	1	7.500.000	1	7.662.000	1	7.827.499	1	22.989.499	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit				1	1	1.500.000	1	1.532.400	1	1.565.500	1	4.597.900	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah penetapan kebijakan bidang penanaman modal.	0,9				84	90	25.085.388	95,4	25.627.232	100	26.180.781	100	76.893.401	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	%	Pelaku Usaha	Jumlah Dokumen		100	100	16.723.592	100	17.084.822	100	17.453.854	100	51.262.267	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen				2	2	8.361.796	2	8.542.411	2	8.726.927	6	25.631.134	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen				N/A	2	8.361.796	2	8.542.411	2	8.726.927	6	25.631.134	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan potensi investasi	%	Pelaku Usaha/ Investor	Jumlah Dokumen		100	100	8.361.796	100	8.542.411	100	8.726.927	100	25.631.134	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen				1	1	8.361.796	1	8.542.411	1	8.726.927	1	25.631.134	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan ekspose dan promosi potensi investasi	%				100	100	33.717.908	100	34.446.215	100	35.190.253	100	103.354.376	KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	teraksananya kegiatan pameran potensi investasi penanaman modal	Kali	Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan		2	2	33.717.908	2	34.446.215	2	35.190.253	2	103.354.376	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan				2	2	33.717.908	2	34.446.215	2	35.190.253	2	103.354.376	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				80,51	82	243.825.272	83	249.091.898	85	254.472.283	85	747.389.453	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	%	Pelaku Usaha	Jumlah Izin Terbit		100	100	243.825.272	100	249.091.898	100	254.472.283	100	747.389.453	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Pelaku Usaha				4000	4000	120.000.000	4500	122.592.000	5000	125.239.987	13500	367.831.987	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan	Kegiatan Usaha				2137	2372	25.000.000	2633	25.540.000	2922	26.091.664	2922	76.631.664	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Pelaku usaha				8	8	84.956.256	8	86.791.311	8	88.666.003	8	260.413.571	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	dokumen				2	2	13.869.016	2	14.168.587	2	14.474.628	6	42.512.231	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	%				100	100	264.992.824	100	270.716.669	100	276.564.149	100	812.273.642	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	teraksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian usaha penanaman modal	%	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha		100	100	264.992.824	100	270.716.669	100	276.564.149	100	812.273.642	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi					24	24	34.500.000	24	35.245.200	24	36.006.496	24	105.751.696	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					4	4	34.500.000	5	35.245.200	6	36.006.496	15	105.751.696	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi					155	155	195.992.824	158	200.226.269	160	204.551.156	160	600.770.249	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem dan terintegrasi secara elektronik	95%				80	95	76.763.024	98	78.421.105	100	80.115.001	100	235.299.130	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	teraksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem	%	DPMTSP	Jumlah Dokumen		100	100	76.763.024	100	78.421.105	100	80.115.001	100	235.299.130	
Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Dokumen				1	1	76.763.024	1	78.421.105	1	80.115.001	1	235.299.130	
								4.487.240.797		4.584.165.198		4.683.183.167			

Tabel 2.2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Formulir E. 81 - Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2024 S.D. Desember 2024
OPD :DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Indikator : _____ Target 2023 : _____
2. Indikator : _____ Target 2024 : _____

Disini dengan Anggaran
Perubahan yang berakhir

				Diketahui dan telah TC 2023 Renstra OPD		Diketahui Realisasi Th. 2023 + 2024		Diketahui target kinerja dan anggaran Th. 2023 tidak ada perubahan (bila ada)		Diketahui Realisasi kinerja dan anggaran s/d Th.1		Diketahui Realisasi kinerja dan anggaran s/d Th.2		Diketahui Realisasi kinerja dan anggaran s/d Th.3		Diketahui Realisasi kinerja dan anggaran s/d Th.4		Kokom ini sudah ada formulanya dihitung secara otomatis												
No	Tgl Jl Sa	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Th 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023 (%)		OPD Penan BSPG Jawab
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1. Tujuan OPD :																														
Meningkatkan nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan pertanian dalam mendukung penanaman modal				%	1	55	xx		15																					
Sasaran OPD :																														
Widagratnya penanaman modal daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan pertanian				%	91	xx		91																						
		18																												
		18																												
		2	18			1																								
		2	18	01																										
		2	18	01	001																									
		2	18	01	201																									
		2	18	01	201	0001																								
		2	18	01	201	0006																								
		2	18	01	202																									
		2	18	01	202	0001																								
		2	18	01	202	0003																								
		2	18	01	202	0005																								
		2	18	01	203																									
		2	18	01	203	0006																								
		2	18	01	206																									
		2	18	01	206	0006																								
		2	18	01	206																									

No	Jenis / Sub Jenis	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab					
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	2	18	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	5,399,618	50	1,832,300	1	286,400	2,118,700					1,832,300		1	1,832,300	100	86.48	3,664,600	-	67.87					
	2	18	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	80	80,148,831	80	11,925,500	1	28,498,360	30,623,360					2,125,000		10,982,000	1	10,987,400	100	78.68	36,010,900	-	44.94				
	2	18	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	146750	114,344,372	146,750	1,011,300	2	2,749,800	3,761,100					1,011,300	2	2,749,800	2	3,761,100	100	100.00	4,772,400	-	4.17				
	2	18	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100	9,442,368	100		2	7,200,000	7,200,000					1,500,000	1	750,000	1	2,250,000	50	31.25	2,250,000	-	23.83				
	2	18	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	330	105,319,718	330	7,247,000	12	10,176,000	27,461,000					6,507,721		200,000	10	20,599,687	83	99.44	34,554,408	-	32.81				
	2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	146,008,813	100	170,690,800	100	121,807,680	113,562,900	13	15,600,000	21	21,455,220	26	32,090,000	18	19,935,520	78	92,990,740	77.53	81.88	178	263,681,540	177.53	180.59		
	2	18	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	49,446,701	3	63,960,960	36	14,400,000	3,000,000					36	3,000,000	-	36	3,000,000	100	100.00	66,960,960	-	135.42				
	2	18	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	70,248,298	12	106,729,840	13	107,407,680	110,562,900	2	15,600,000	3	21,455,220	-	29,000,000	7	19,935,520	12	89,990,740	92	81.39	196,720,580	-	280.04			
	2	18	01	209		Pemeliharaan Sarang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	235,904,249	100	74,767,000	100	160,191,320	142,093,490	8	12,051,600	12	18,799,046	20	31,330,512	35	49,907,950	74	112,069,108	73.93	78.87	174	186,836,108	173.93	79.17		
	2	18	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	158,442,448	25	74,767,000	24	151,041,320	132,943,490					12,051,600	5	18,799,046		31,330,512	19	49,907,950	24	112,069,108	100	84.30	186,836,108	-	117.92
	2	18	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	10	5,300,000			15	9,150,000	9,150,000							15	-	100	-	-	-	-	-	-			
	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penempatan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	%	90	59,727,899	90	24,555,000	90	22,425,000	22,425,000	4.41	1,100,000	6.62	1,650,000	8.83	2,200,000	22.98	5,725,000	43	10,675,000	47.60	47.60	66	35,230,000	73.80	58.96		
	2	18	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal	%	100	6,519,668	100	24,555,000	100	17,800,000	17,800,000	6	1,100,000	9	1,650,000	12	2,200,000	6	1,100,000	34	6,050,000	33.99	33.99	114	30,605,000	133.99	469.43		
	2	18	03	201	0001	Menetapkan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	6,519,668	10	24,555,000	2	17,800,000	17,800,000					1,100,000	1	2,200,000	1	1,100,000	2	6,050,000	100.00	33.99	12	30,605,000	600.00	469.43	
	2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan potensi investasi	Dokumen	2	53,208,230	2	-	1	4,625,000	4,625,000							1	4,625,000	1	4,625,000	100.00	100.00	3	4,625,000	150.00	8.69		
	2	18	02	202	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	53,208,230			1	4,625,000	4,625,000							1	4,625,000	1	4,625,000	100.00	100.00						
	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan ekspose dan promosi sistem investasi	%	100	60,156,824	100	33,005,000	100	33,750,000	33,750,000	6.52	2,200,000	9.78	3,300,000	13.04	4,400,000	19.81	6,085,000	49	16,585,000	49.14	49.14	75	49,590,000	74.57	82.43		

No	Urutan / Sub Urutan	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Rencana OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja/DPA OPD Th 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja/DPA Renja/DPA OPD Th 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	
					Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	Perubahan (Rp.)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		2 18 00 201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi penanaman modal	%	100	60,156,824	100	33,005,000	100	33,750,000	33,750,000	7	2,200,000	10	3,300,000	13	4,400,000	20	6,685,000	49	16,585,000	49.14	49.14	149	49,590,000	149.14	82.43			
		2 18 00 201 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	60,156,824	2	33,005,000	2	33,750,000	33,750,000	-	2,200,000	-	3,300,000	4,400,000	2	6,685,000	2	16,585,000	100.00	49.14	4	49,590,000	200.00	82.43				
		2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93.5	106,550,317	92	236,670,000	82	1,329,523,000	1,370,133,830	2.48	40,234,865	3.74	60,659,519	41.91	679,558,652	9.75	162,979,875	58	943,432,911	70.60	68.86	75	1,182,102,911	81.63	385.61			
		2 18 04 201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	%	100	106,550,317	100	236,670,000	100	1,329,523,000	1,370,133,830	3	40,234,865	5	60,659,519	51	679,558,652	12	162,979,875	71	943,432,911	70.60	68.86	171	1,182,102,911	170.60	385.61			
		2 18 04 201 0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	3600	263,086,221	3,600	155,510,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,510,000	-	59.11			
		2 18 04 201 0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	9	31,544,864	9	83,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,160,000	-	263.62				
		18 04 201 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	4,000	1,197,200,000	1,237,810,830	3,403	33,934,865	8,580	51,209,519	735	619,311,352	1,645	112,954,175	14,369	817,409,911	359	66.04	9999	817,409,911	-	-	-	-	-				
		18 04 201 0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	8	132,323,000	132,323,000	6,300,000	6	9,450,000	60,247,300	6	50,025,700	12	126,003,000	150	95.24	12	126,003,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 18 06	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	100	171,067,272	100	259,390,000	100	400,674,000	400,674,000	1.37	5,500,000	2.06	8,250,000	28.72	115,070,000	66.48	266,354,000	99	395,174,000	98.63	98.63	99	654,564,000	99.31	382.59			
		2 18 06 201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian Kabupaten Lombok Timur	%	100	171,067,272	100	259,390,000	100	400,674,000	400,674,000	1	5,500,000	2	8,250,000	29	115,070,000	66	266,354,000	99	395,174,000	98.63	98.63	199	654,564,000	198.63	382.59			
		18 06 201 03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	12	57,029,091	12	259,390,000	155	400,674,000	400,674,000	-	5,500,000	-	8,250,000	120	115,070,000	121	266,354,000	241	395,174,000	155	98.63	253	654,564,000	-				
		2 18 06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem dan terintegrasi secara elektronik	%	95	47,989,943	95	75,140,000	95	66,162,000	66,162,000	8.76	6,100,000	13.14	9,150,000	55.59	38,712,000	8.76	6,100,000	88	60,062,000	90.78	90.78	91	135,202,000	95.39	281.73			
		2 18 06 201	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	%	100	47,989,943	100	75,140,000	100	66,162,000	66,162,000	9	6,100,000	14	9,150,000	59	38,712,000	9	6,100,000	91	60,062,000	90.78	90.78	191	135,202,000	190.78	281.73			

H. M. ZAIDAR ROHMAN, S.STP., MH.
Nip. 19751218 199511 1 001

Tabel 2.2.1

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
TRIWULAN IV 2024**

Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Urusan : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Bidang : PENANAMAN MODAL

Kode Rekening					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Triwulan lalu					Triwulan ini					s/d Triwulan ini					SISA ANGGARAN	
						Induk	Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik				
								Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Volume	Kinerja (%)	Fisik (%)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6,347,868,867	5,567,573,694	3,621,564,986	57.05					1,321,171,507	23.73				4,942,736,493					624,837,201
2	18			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,347,868,867	5,567,573,694	3,621,564,986	57.05					1,321,171,507	23.73				4,942,736,493	88.78				624,837,201
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,495,334,867	3,674,428,864	2,643,479,950	58.80	100	58.80			873,327,632	23.77	100	23.77	11.88	3,516,807,582	95.71	100	82.57		157,621,282
2	18	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,042,000	9,780,600	6,254,200	124.04	100	124.04	62.02		2,900,000	29.65	100	29.65	14.83	9,154,200	93.60	100	138.87		626,400
2	18	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,254,000	6,992,600	5,066,200	224.76	4	224.76			1,900,000	27.17	4	27.17	339.64	6,966,200	309.06	4	251.94	3,149.21	26,400
2	18	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,788,000	2,788,000	1,188,000	42.61	5	42.61			1,000,000	35.87	5	35.87	358.68	2,188,000	78.48	5	78.48		600,000
2	18	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,144,985,307	3,332,427,714	2,474,251,051	59.69	100	59.69	29.85		763,697,275		100	22.92	11.46	3,237,948,326	78.12	100			94,479,388
2	18	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,988,831,307	3,155,453,714	2,354,911,051	59.04	30	59.04	98.40		727,017,275	23.04	30	23.04	38.40	3,081,928,326	77.26	30	82		73,525,388
2	18	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154,800,000	169,770,000	113,250,000	73.16	12	73.16	304.83		36,680,000	21.61	12	21.61	90.02	149,930,000	96.85	12	94.8		19,840,000
2	18	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,354,000	7,204,000	6,090,000	449.78	2	449.78	11,244.46		-	-	2	-	-	6,090,000	449.78	2	449.78		1,114,000
2	18	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,400,000	5,400,000	3,600,000	66.67	100	66.67	33.33		1,800,000		100	33.33	16.67	5,400,000	100.00	100			-
2	18	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,400,000	5,400,000	3,600,000	66.67	3	66.67	1,111.11		1,800,000	33.33	3	33.33	555.56	5,400,000	100.00	3	100.00		-
2	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57,908,560	71,164,160	24,158,321	41.72	100	41.72	20.86		35,086,887		100	49.30	24.65	59,245,208	102.31	100			11,918,952
2	18	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	286,400	2,118,700	1,832,300	639.77	1	639.77	31,988.48		-	-	1	-	-	1,832,300	639.77	1	639.77		286,400
2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,498,360	30,623,360	13,107,000	45.99	1	45.99	2,299.61		10,987,400	35.88	1	35.88	1,793.96	24,094,400	84.55	1	81.87		6,528,960
2	18	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,749,800	3,761,100	1,011,300	36.78	2	36.78	919.43		2,749,800	73.11	2	73.11	1,827.79	3,761,100	136.78	2	109.89		-
2	18	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	7,200,000	1,500,000	20.83	2	20.83	520.83		750,000	10.42	2	10.42	260.42	2,250,000	31.25	2	31.25		4,950,000
2	18	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,174,000	27,461,000	6,707,721	34.98	12	34.98	145.76		20,599,687	75.01	12	75.01	312.56	27,307,408	142.42	12	110.00		153,592
2	18	1	208		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,807,680	113,562,900	73,055,220	59.98	100	59.98	29.99		19,935,520		100	17.55	8.78	92,990,740	76.34	100			20,572,160
2	18	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,400,000	3,000,000	3,000,000	20.83	36	20.83	28.94		-	-	36	-	-	3,000,000	20.83	36	20.83		-
2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107,407,680	110,562,900	70,055,220	65.22	13	65.22	250.86		19,935,520	18.03	13	18.03	69.35	89,990,740	83.78	13	83.25		20,572,160

2	18	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,191,320	142,093,490	62,161,158	38.80	100	38.80	19.40	49,907,950		100	35.12	17.56	112,069,108	69.96	100		30,024,382
2	18	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151,041,320	132,943,490	62,161,158	41.16	24	41.16	85.74	49,907,950	37.54	24	37.54	78.21	112,069,108	74.20	24	78.70	20,874,382
2	18	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,150,000	9,150,000	-		4	-		-	-	4	-	-	-	-	24	-	9,150,000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	22,425,000	22,425,000	4,950,000	22.07	100	22.07	11.04	5,725,000		100	25.53	12.76	10,675,000	47.60	100		11,750,000
2	18	2	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17,800,000	17,800,000	4,950,000	27.81	100	27.81	13.90	1,100,000		100	6.18	3.09	6,050,000	33.99	100		11,750,000
2	18	2	201	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17,800,000	17,800,000	4,950,000	27.81	2	27.81	695.22	1,100,000	6.18	2	6.18	154.49	6,050,000	33.99	2	33.99	11,750,000
2	18	2	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4,625,000	4,625,000	-		100	-	-	4,625,000		100	100.00	50.00	4,625,000	100.00	100		-
2	18	2	202	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	4,625,000	4,625,000	-		1	-		4,625,000	100	1	100.00	5,000.00	4,625,000	100.00	2	100.00	-
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	33,750,000	33,750,000	9,900,000	29.33	100	29.33	14.67	6,685,000		100	19.81	9.90	16,585,000	49.14	100		17,165,000
2	18	3	20.1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33,750,000	33,750,000	9,900,000	29.33	100	29.33	14.67	6,685,000		100	19.81	9.90	16,585,000	49.14	100		17,165,000
2	18	3	20.1	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	33,750,000	33,750,000	9,900,000	29.33	2	29.33	733.33	6,685,000	19.81	2	19.81	495.19	16,585,000	49.14	2	49.14	17,165,000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,329,523,000	1,370,133,830	780,453,036	58.70	100	58.70	29.35	162,979,875		100	11.90	5.95	943,432,911	70.96	100		426,700,919
2	18	4	20.1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,329,523,000	1,370,133,830	780,453,036	58.70	100	58.70	29.35	162,979,875		100	11.90	5.95	943,432,911	70.96	100		426,700,919
2	18	4	20.1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-	
2	18	4	20.1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-			-	
2	18	4	20.1	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1,197,200,000	1,237,810,830	704,455,736	58.84	4,000	58.84	0.74	112,954,175	9.13	4,000	9.13	0.11	817,409,911	68.28	2	67.97	420,400,919
2	18	4	20.1	7	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	132,323,000	132,323,000	75,997,300	57.43	8	57.43	358.96	50,025,700	37.81	8	37.81	236.29	126,023,000	95.24	2	95.24	6,300,000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	400,674,000	400,674,000	128,820,000	32.15	100	32.15	16.08	266,354,000		100	66.48	33.24	395,174,000	98.63	100		5,500,000

2	18	5	20.1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400,674,000	400,674,000	128,820,000	32.15	100	32.15	16.08	266,354,000		100	66.48	33.24	395,174,000	98.63	100		5,500,000
2	18	5	20.1	1	Pemantauan Penanaman Modal	400,674,000	400,674,000	128,820,000	32.15	155	32.15	10.37	266,354,000	66.48	155	66.48	21.44	395,174,000	98.63	155	98.63	5,500,000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	66,162,000	66,162,000	53,962,000	81.56	100	81.56	40.78	6,100,000		100	9.22	4.61	60,062,000	90.78	100		6,100,000
2	18	6	20.1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66,162,000	66,162,000	53,962,000	81.56	100	81.56	40.78	6,100,000		100	9.22	4.61	60,062,000	90.78	100		6,100,000
2	18	6	20.1	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	66,162,000	66,162,000	53,962,000	81.56	1	81.56	4,078.02	6,100,000	9.22	155	9.22	2.97	60,062,000	90.78	155	90.78	6,100,000
									-					-					-			
JUMLAH						6,347,868,867	5,567,573,694	3,621,564,986					1,321,171,507					4,942,736,493				624,837,201

Selong, Desember 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Lombok Timur

HUSNUL BASRI, SP.,M.M.A.
NIP. 19690726 200003 1 002